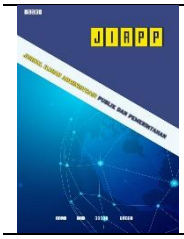

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP), 1(1) 2020: 16-21,
DOI: 10.31289/jiaap.v1i1.775

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)

Available online http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jiaap
Diterima: 08 Oktober 2021; Disetujui: 08 Oktober 2021; Dipublish: 20 Januari 2022

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Policy Implementation of Public Business Credit (KUR) In Bank Rakyat Indonesia Tanjung Morawa Unit, Deli Serdang District

Riri Novalina Peronica, Abdul Kadir, & Indra Muda
Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area

Abstrak

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar seperti didaerah tanjung morawa. Bank Rayat Indonesia adalah Bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Terbanyak. Hal ini dikarenakan Bank Rakyat Indonesia memiliki jaringan yang luas di bandingkan dengan Bank pelaksana yang lainnya sehingga mudah dalam penyaluran kredit. Sehingga dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk memengetahui implementasi kebijakan serta permasalahan yang terjadi pada pemberian Kredit Usaha kepada nasabah di BRI Unit Tanjung Morawa. Metode penelitian ini menggunakan Smetode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Dengan kesimpulan Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BRI Unit Tanjung Morawa belum berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan kendala dalam penyaluran Kedit Usaha Rakyat yang dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak Bank dan kurangnya sumber daya manusia yang ada, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai KUR terhadap para calon nasabah.
Kata Kunci: Implementasi; KUR; dan BRI

Abstract

The role of banking in economic development is to channel funds for economic activities, one of which is in the form of credit for individual communities or business entities in the surrounding areas such as the Cape Morawa area. Bank Rayat Indonesia is an executing bank that distributes the most people's business loans. This is because Bank Rakyat Indonesia has a broad network compared to other implementing banks so that it is easy to distribute credit. So so so so that that aims to find out the implementation of policies and problems that occur in presenting Business Loans to customers at the Tanjung Morawa BRI Unit. This research method uses qualitative methods. Technique data through observation and documentation. By wrongly, the implementation of policies carried out by the Tanjung Morawa BRI Unit has not gone well, causing suspicion in the distribution of the People's Business Credit which is due to the communication made by the Bank and reducing existing human resources, resulting in reduced understanding of KUR for prospective customers.
***Keywords**: Implementation; KUR; and BRI*

***How to Cite**:* Peronica, R.N. Kadir, A. & Muda, I. (2021). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP), 1(1) 2020: 16-21,*

**E-mail: peronicariri@gmail.com* *ISSN xxxx-xxxx (Online)*

,

PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam membangun perekonomian adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha yang berada di daerah sekitar seperti yang terletak di daerah tanjung morawa (Afifufin dkk, 2020). Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidapan bagi setiap manusia (dwika dkk, 2020; Kurniaty, 2020). Fasilitas kredit, yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Peranan perusahaan penjamin dalam KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank pelaksana atas KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank pelaksana atas KUR yang diberikan kepada UMKMK. Meski begitu, debitur UMKMK tetap wajib melunasi KUR yang diterima dari Bank pelaksana. Adapun pihak yang membayar Imbal Jasa Penjamin (IJP). Di antara beberapa Bank pelaksana yang menyalurkan KUR, BRI adalah Bank pelaksana yang menyalurkan KUR terbanyak. Hal ini di karenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan Bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit. BRI adalah Bank pelaksana yang menyalurkan KUR terbanyak. Hal ini di karenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan Bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran kredit. Berdasarkan fenomena yang peneliti lakukan saat wawancara dengan bapak Undangenta Ginting, pada tahun 2018 nasabah pembiayaan KUR dengan berbagai sektor yang di berikan pembiayaan pada setiap sektornya, dari data yang peneliti lakukan yang paling banyak di berikan pembiayaan KUR adalah sektor perdagangan yang berjumlah 174 nasabah. Menurut studi pendahuluan (prasurvei) nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dan implementasi kebijakan KUR Mikro ini pada pelaksana (Zakasyi dkk, 2021; Rasaili, 2021).

Dari wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha mikro calon debitur KUR Mikro, ada beberapa hal yang di keluhkan berkenaan dengan implementasi KUR mikro yaitu seperti yang disampaikan oleh pedagang pasar tradisional atau UMKM setempat tidak terlalu banyak masalah saat pengambilan KUR di BRI Unit Tanjung Morawa,namun menurut Bapak Gito salah satu pedagang telur di pasar tradisional Tanjung Morawa tepatnya di jl.pajak inpress, kesulitan yang mereka alami saat pengambilan KUR adalah persyaratan yang diminta oleh pihak Bank itu sendiri. Persyaratan seperti agunan, namun agunan yang diberikan juga belum tentu mendapatkan jumlah KUR yang diajukan pelanggan/nasabah itu sendiri (Saragih dkk, 2021; Ali dkk, 2019). Dan kebanyakan pelanggan/nasabah mengetahui adanya KUR ini hanya melalui sesama nasabah, dan dari pihak Bank sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi soal KUR di depan halaman Bank saja, sehingga banyak masyrakat yang tidak memahami soal pengambilan/pengajuan KUR ini. Kurangnya karyawan BRI setempat menjadi salah satu pemicu dari tidak dilakukan sosialisasi mengenai adanya KUR ini (Hakim dkk, 2019; Putri dkk, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus pada Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa beserta masalah dan kendala yang ada seperti kurangnya sosialisasi/ sistem promosi untuk peminjaman kredit usaha rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa, supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan para calon nasabah mengetahui cara pengambilan kredit usaha rakyat beserta syarat maupun ketentuannya. Menurut Sugiyono (2006:15) metode penelitan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandanskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti melaksanakan penelitian ini pada saat semester ganjil. Untuk memperoleh

data dari lapangan peneliti memakai beberapa cara/metode dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian, seperti kepustakawan yang segala usaha dilakukan oleh si peneliti dalam mencari informasi yang relavan dengan topik permasalahannya. Informasi itu bisa di temukan dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,h karangan-karangan ilmiah, jurnal, skripsi tesis dan disertai, peraturan- peraturan buku taunan dan sumber-sumber tertulis. Sugiono (2015:203), mengatakan teknik dalam pengumpulan data digunakan apabila penelitiaanya berkenaan dengan tingka laku manusianya, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang akan diamati tidak terlalu besar. Dalam melakukan penelitiaan arus terlebi daulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang akan ingin diteliti yaitu BRI Unit Tanjung Morawa. Menurut Esterberg dalam Sugyono (2015 :318) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab seingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Menurut Arikunto (2006:158), "dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini. Dokuentasi menurut Sugiyono (2012 : 240) dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitif. Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Reduksi data Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana yang dianggap menjadi pusat penelitian dilapangan. Penyajian data Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar di lakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang di sederhanakan dan mudah dipahami.Pengambilan keputusan atau verifikasi Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalm penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Bank Komersial tertua, Bri konsisten memberikan pelayanan kepada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia. Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 Tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis. BRI terus berupaya menyelaraskan pengembangan demografi masyarakat dengan senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indinesia. Selain focus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan serta layanan bisnis internasional. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja

sehingga kini BRI mengoperasikan 10.612 unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 4 unit kerja luar negeri), 603 kantor cabang pembantu, 983 kantor kas, 5.360 BRI Unit, 2.543 Teras BRI, dan 636 Teras BRI keliling. Saat ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia. Salah satunya adalah BRI Unit Tanjung Morawa. BRI Unit Tanjung Morawa yang letaknya di Jl.P.

,
Kemerdekaan No. 43, Kec, Tanjung Morawa Kab, Deli Serdang. Sangat dekat dengan Kawasan Perniagaan Sandang dan Pangan yaitu Pasar Tradisional Tanjung Morawa.

Pelaksana pemberian kredit usaa rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa melakukan proses yang pertama yaitu tahap permohonan kredit dimana calon debitur datang dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak bank dan mengisi formulir yang dibantu oleh customer service. Tahap pemeriksaan dimana syarat-syarat yang sudah dilengkapi akan dilakukan peninjauan secara lapangan. Tahap pemberian putusan nasaba akan menerima keputusan kredit yang berisi persetujuan dari pihak bank. Tahap pecairan kredit apabila semua sesuai dengan persyaratan kredit dan diikat perjanjian kredik maka nasabah bias mengambil dana pinjaman kepada bagian teller.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan public. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan penanganan perekonomian yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke setiap daerah untuk meningkatkan Sektor Rill dan memberdayakan usaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia menjadi salah satu Bank terbesar yang mengeluarkan dana Kredit Usaha Rakyat yang disubsidi oleh pemerintah. Pihak Bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Penulis mengambil model Implementasi Kebijakan yang digunakan oleh Eward III untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimpelementasikan dalam kebijakan Kredit Usaha Rakyat di Unit Tanjung Morawa.

Komunikasi sebagai metode implementasi apabila dipahami oleh implementator dalam melaksanakan atau dalam penyampaian tujuan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interprestasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesuai dengan faktor komunikasi yang mempengaruhi kebijakan, Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa khususnya dalam bidang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai pelaksana dalam pemberian KUR sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan, staf pelaksana sudah terlebih dahulu diberi pemahaman atau kejelasan tentang pelaksana dan harus melaksanakannya dengan konsisten.

Faktor sumberdaya sangat mempengaruhi tingkat berjalannya suatu kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dan pelaksanaanya sumberdaya harus tepat dalam bidangnya masing-masing. Jika personil yang bertanggung jawab untuk melakukan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relavan dan cukup untuk menginplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang

harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Dengan adanya SDM yang baik dapat menjadikan peningkatan kinerja program. Sama seperti sumber daya manusia yang kurang memadai di bri unit tanjung morawa sehingga implementasi kebijakan kurang berjalan sesuai harapan. Faktor disposisi ini lebih ke sikap atau watak yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang implementor dalam pelaksanaan yang dilakukan. Watak dan karakter yang dimiliki implementor sangat mempengaruhi faktor disposisi dalam tingkat kepedulian antara atasan dan bawahan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Struktur birokrasi yang diterapkan harus berdasarkan kebutuhan dalam organisasi.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Tanjung Morawa adalah Pada dasarnya permasalahan yang terjadi dalam pengambilan KUR pada perbankan karena adanya iklan layanan masyarakat yang disampaikan pemerintah melalui menteri kperasi dan umkm, yang menyatakan bahwa KUR adalah kredit tanpa agunan, sehingga sangat meresahkan Bank pelaksana KUR. Mengenai iklan yang ada, pihak Bank pelaksana seperti BRI menyarankan kepada pemerintah agar dibuat iklan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa KUR bukanlah Kredit bantuan yang tidak perlu dikembalikan dan juga bukan kredit tanpa agunan. Agar tidak membuat kesalahpahaman anatara pihak bank dan calon nasabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi kebijakan yang dilakukan BRI Unit Tanjung Morawa dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan informan. Berdasarkan teori Edward III yang menyebutkan tentang faktor-faktor atau variabel kesuksesan dalam pengimplemetasian sebuah kebijakan yaitu komunikasi, disposisi,sumberdaya dan struktur birokrasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini akan ditarik berdasarkan variabel tersebut yaitu:

a. Komunikasi

1. Komunikasi menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan, masyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pada proses kebijakan dalam kredit usaha rakyat di BRI Unit Tanjung Morawa yang dilakukan oleh Pihak BRI Unit kepada calon nasabah/masyarakat belum berjalan dengan baik.hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan informan kunci dan utama yang mengatakan bahwa pihak BRI Unit hanya melakukan komunikasi pada saat calon nasabah ingin mengajukan pinjaman ke Bank saja, pihak Bank tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat. Dan hal itu dibenarkan oleh informan tambahan karna ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya KUR ini.

b. Sumberdaya

Dalam pernyataan- pernyataan yang telah disampaikan oleh para informan bahwasanya BRI Unit Tanjung Morawa masih kekurangan sumberdaya manusia yaitu pegawai yang bertugas di lapangan karena permintaan KUR yang meningkat dan hal itu terjadi selama setahun ini.

c. Disposisi

Dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi diatur dengan sangat baik terbukti dari sikap saling menghargai anatara atasan dan bawahan dan saling membantu. Atasan yang mengapresiasikan prestasi kinerja para pegawai dan memberikan dukunguan serta kebebasan dalam bekerja.

d. Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasinya sudah terlihat jelas dimana kepala unit yang bertanggung jawab di BRI Unit Tanjung Morawa, dan untuk seluruh pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing- masing.

2. Dalam permasalahan yang terjadi ketika pengambilan Kredit Usaha Rakyat yaitu kesalahpahaman yang terjadi antara pihak calon nasabah dengan pihak BRI, yang menyebabkan kendala pada pihak BRI untuk menyalurkan Kredit usaha Rakyat. Kendala itu juga tidak luput dari implementasi yang tidak berjalan dengan baik itu dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

(2012) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta

(2015). Metode Penelitian & Pengambangan Bandung : Alafabeta

Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(1), 59-69

Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 120-130.

,

Arikunto, Suharsimi. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.

Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 561-572. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112

Hakim, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 131-137

Kurniaty, E. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 227-234. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280

Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
(JIPIKOM), 1(2) 2019: 126-132

Rasaili, W. (2021). Literasi Masyarakat dan Pengentasan Buta Aksara: Kebijakan Pemerintah dalam Merealisasikan SDGs Quality Education di Kabupaten Sumenep. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(1), 63-70. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.583

Saragih, D., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1234-1245. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891

Sugyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Zarkasyi, M., Zubaedah, R., & Hilmi, I. (2021). Sosialisasi Kebijakan StimulusPerekonomian Nasional kepada UMKM terdampak Covid-19 untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3), 1031-1039. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.494